



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Perspektif Hukum Progresif

Dr. YUDI KRISTIANA, S.H., M.Hum

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	121/mhk/19/C-1		
Th. Angg.	2019	Cat C-1	
PARAP		TGL. 17/09/2019	


Thefamedia

DAFTAR ISI

PENGANTAR – v

DAFTAR ISI – vii

BAB 1

MENGAPA HUKUM PROGRESIF – 1

- A. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif – 1
- B. Kegelisahan Seorang Murid – 4
- C. Menyemai Hukum Progresif – 8
- D. Identifikasi Hukum Progresif – 10
- E. Realitas Pemberantasan Korupsi – 17
- F. Indonesia Membutuhkan Jaksa Progresif – 23

BAB 2

FENOMENA KORUPSI – 27

- A. Korupsi Menjamah Semua Ranah – 27
- B. Dampak Korupsi – 33
- C. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi – 34

BAB 3

TINDAK PIDANA KORUPSI – 41

- A. Pengertian Korupsi – 41
- B. Sejarah Regulasi – 44
- C. Instrumen Internasional Tentang Korupsi – 50

- D. Jenis Tindak Pidana Korupsi — 54
- E. Penanganan Perkara Korupsi — 55

BAB 4

OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN — 59

- A. Pidana Tambahan Uang Pengganti — 60
- B. Uang Pengganti Berdasarkan SEMA No 5 Tahun 2014 — 66
- C. Pidana Tambahan Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dalam Jabatan Publik — 69

BAB 5

PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI DAN TUJUAN PEMIDANAAN — 75

- A. Titik Taut Rezim Hukum — 75
- B. Tujuan Penggunaan Undang-Undang — 76
- C. Tujuan Penggunaan Undang-Undang Korupsi — 77
- D. Pedoman Penerapan Undang-Undang antar Rezim Hukum — 78

BAB 6

LEMBAGA PENUNJANG PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI — 83

- A. Badan Pemeriksa Keuangan — 84
- B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan — 89
- C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan — 91
- D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban — 98

BAB 7

KERJASAMA INTERNASIONAL

DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI — 101

- A. Kerjasama Timbal Balik Masalah Pidana atau MLA — 102

BAB 8

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI — 135

- A. Urgensi Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 135



- B. Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 136
- C. Tata Cara Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 139
- D. Hak dan Tanggungjawab atas Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 140
- E. Kerahasiaan atas Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 142
- F. Penghargaan atas Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi — 142
- G. Partisipasi Media dalam Pemberantasan Korupsi — 143

DAFTAR PUSTAKA — 151

RIWAYAT PENULIS — 155